

**ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA
SEMARANG**

Oleh:

Elfina Grasia, Kismartini, Maesaroh

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang sering mengalami bencana tanah longsor. BPBD Kota Semarang adalah badan yang bertanggung jawab untuk menangani bencana yang terjadi di Kota Semarang, salah satunya yaitu bencana tanah longsor. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif tipe deskriptif serta penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang belum maksimal, karena masih ditemukan kendala dalam beberapa aspek yaitu produktivitas dan responsivitas. Faktor penghambat adalah terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas, pemahaman masyarakat terkait bencana yang masih kurang, mis komunikasi dengan masyarakat, masih adanya keluhan dari masyarakat karena lokasi kantor BPBD Kota Semarang yang tidak berada di tengah Kota juga menyebabkan BPBD membutuhkan waktu untuk sampai dilokasi bencana, sedangkan faktor tim dan faktor personal menjadi pendorong.

Kata Kunci: Kinerja, Produktivitas, Responsivitas, Akuntabilitas

PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCIES (BPBD) IN LANDSLIDE DISASTER MANAGEMENT IN SEMARANG CITY

ABSTRACT

Semarang City is one of the cities in Central Java that often experiences landslide disasters. The BPBD of Semarang City is the agency responsible for handling disasters that occur in Semarang City, one of which is a landslide disaster. The purpose of this research is to describe and analyse the performance of BPBD in landslide disaster management in Semarang City and to find out the factors that encourage and inhibit the performance of BPBD in landslide disaster management in Semarang City. The research method used is descriptive type qualitative research method and the determination of informants using purposive sampling. The results showed that the performance of BPBD in landslide disaster management in Semarang City is not yet optimal, because there are still obstacles in several aspects, namely productivity and responsiveness. The inhibiting factors are limited budget, limited facilities and infrastructure, lack of public understanding of disasters, miscommunication with the community, complaints from the community because the location of the BPBD office in Semarang City is not in the middle of the city also causes BPBD to take time to arrive at the disaster site, while team factors and personal factors are the driving force.

Keywords: Performance, Productivity, Responsiveness, Accountability

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pada pertemuan antar lempeng tektonik dan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung berapi, dan bencana lainnya. Adanya fenomena La Nina yang terjadi tiga tahun

berturut-turut yaitu dari tahun 2020 hingga awal tahun 2023 menyebabkan bencana hidrometeorologi yang bentuknya seperti curah hujan meningkat, banjir, longsor, dan angin kencang/angin puting beliung.

Dikutip dari [KOMPAS.com](https://www.kompas.com), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat sebanyak 1.798 kejadian terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga 11 Oktober 2022. Dari jumlah kejadian tersebut, tanah longsor menjadi kejadian yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 719 kejadian, diikuti dengan kejadian angin atau puting beliung sebanyak

548 kali, banjir 253 kejadian, dan kebakaran 240 kejadian di berbagai daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan berita tersebut maka bencana yang sering terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah bencana tanah longsor dengan 719 kejadian. Dilansir dari [SINDOnews.com](https://www.sindonews.com) BNPB menyebutkan 4 Provinsi rawan bencana hidrometeorologi basah akibat fenomena La Nina, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kota Semarang merupakan salah satu dari Kabupaten/Kota yang berpotensi terjadi bencana Di Jawa Tengah.

Kota Semarang merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki potensi terjadinya beberapa bencana. Secara topografi Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Kondisi ini membuat Kota Semarang rentan terhadap berbagai bencana, diantaranya yaitu bencana banjir, rob, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, abrasi, kebakaran lahan, dan potensi bencana lain. Ada beberapa sifat tanah di Kota Semarang, yaitu tanah bergerak di Kota Semarang bagian atas dan penurunan tanah di Kota Semarang bagian bawah. Seperti yang diketahui bahwa daerah labil atau tanah gerak, rawan akan tanah longsor.

Berdasarkan data bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sepanjang tahun 2018-2022 telah terjadi sebanyak 1705 kejadian bencana. Dengan bencana terbanyak yaitu bencana tanah longsor dengan 596 kejadian. Kemudian diikuti selanjutnya bencana kebakaran dengan 298 kejadian, bencana banjir dengan 228 kejadian, pohon tumbang sebanyak 260 kejadian, rumah roboh dengan 214 kejadian, puting beliung 100 kejadian dan rob dengan 9 kejadian dalam tahun 2021 dan 2022. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi rawan bencana di Jawa Tengah terutama bencana tanah longsor.

Merespon banyaknya kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana. BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pasal 18 dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak hanya bertanggung jawab saat terjadi bencana, tetapi juga bertanggung jawab pada pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Dalam menyelesaikan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang diperlukan kinerja organisasi yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tanggap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan harus mampu lebih proaktif dalam menanggapi permasalahan. Pada dasarnya setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran suatu organisasi atau program pasti terdapat adanya tantangan, hambatan, dan kendala dalam mencapai hal tersebut. Berdasarkan observasi peneliti BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor belum maksimal dilakukan karena masih terdapat kendala diantaranya masih kurangnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebencanaan yang belum memadai, masyarakat kurang tangguh terhadap bencana, dan lain-lainnya.

Secara umum kinerja organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas. Dalam penelitian kinerja BPBD Kota Semarang, peneliti hanya menggunakan 3 aspek yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas, karena 3 aspek tersebut selalu muncul dalam beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja organisasi. Aspek kinerja tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat bagaimana kinerja BPBD dalam setiap proses penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Semarang. Kinerja BPBD Kota Semarang dapat dikatakan berjalan baik apabila telah memenuhi aspek kinerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Kenyataannya BPBD Kota Semarang masih menemui berbagai hambatan dan kendala yang membuat kinerja dalam menanggulangi bencana tanah longsor belum optimal di beberapa aspek.

Dalam aspek produktivitas, BPBD Kota Semarang dalam membuat program dan kegiatan masih terhambat oleh kesiapan dan partisipasi masyarakat serta belum adanya dokumen kontijensi, minimnya peta evakuasi pada daerah rawan bencana tanah longsor yang baru ada di dua Kelurahan dan total 37 Kelurahan rawan bencana tanah

longsor. Serta minimnya sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk bencana tanah longsor hanya ada di 2 Kelurahan dari 37 Kelurahan rawab bencana tanah longsor.

Aspek responsivitas atau daya tanggap terkendala oleh lokasi kantor BPBD Kota Semarang yang tidak berada ditengah Kota dan berada di daerah Penggaron yang berada di bagian timur Kota Semarang, sedangkan hampir semua daerah rawan tanah longsor berada di Kota Semarang bagian selatan dan barat. Hal tersebut cukup menghambat BPBD Kota Semarang untuk segera merespon dan sampai pada lokasi bencana tanah longsor yang diduga merupakan bagian dari daerah rawan tanah longsor yang berada di Kota Semarang bagian selatan dan barat.

Bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi yaitu LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan laporan kinerja organisasi dalam satu tahun terakhir, dan harus dipublikasikan atau diupload di website resmi yang merupakan bagian dari tranparansi publik. Transparansi LKjIP yang sudah diupload di website resmi BPBD Kota Semarang hanya ada sampai tahun 2021, dan LKjIP tahun 2022 belum ada, padahal ini

sudah pertengahan tahun 2023 yang seharusnya laporan LKjIP tahun 2022 sudah jadi dan sudah diupload di website resmi BPBD Kota Semarang, namun sampai saat ini belum ada dan belum sudah diupload di website resmi BPBD Kota Semarang.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja BPBD Kota Semarang.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang?
- 2) Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang

- 2) Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang

D. KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Sebagai disiplin ilmu Administrasi Publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui peningkatan dalam berbagai bidang diantaranya bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu tentu mengalami pergeseran paradigma. Edward H. Litchfield administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (Syafiie, 2010).

Nicholas Henry (Keban, 2008) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu

- 1) Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 - 1926)
- 2) Prinsip – Prinsip Administrasi Negara (1927 – 1937)
- 3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)
- 4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)
- 5) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – sekarang)

2. Manajemen Publik

Manajemen publik masuk dalam ruang lingkup administrasi publik. Menurut Overman dalam Keban (2008), mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Manajemen publik merupakan sebuah tindakan pemerintah yang didalamnya terdapat beberapa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan melayani publik atau masyarakat secara prima dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk melaksanakan setiap tugas – tugas yang diberikan kepada organisasi untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang telah ditentukan. Kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil atau tujuan, tetapi juga menekankan pada proses pelaksanaan dan sumber daya guna mencapai tujuannya. Menurut Bryson (dalam Sembiring, 2012:82) mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara para anggota dan komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Sudarmanto (2014) yang mengutip dari Dwiyanto terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

- a. Produktivitas, dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
- b. Kualitas layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
- c. Responsitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- d. Responsibilitas, menjelaskan/ mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholder.

4. Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang ditimbulkan oleh alam maupun non alam dan atau ulah manusia yang menyebabkan kerugian secara material dan non material. Tanah longsor adalah gerakan masa tanah dalam jumlah besar yang bergerak pada bidang geser tertentu, di mana pada bidang tersebut tahanan tanah dalam menahan geseran terlampaui. Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief

(2006:193) longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya - gaya yang bekerja pada lereng atau gaya dorong di daerah lereng lebih besar dari gaya tahan yang ada di lereng tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian dilakukan di BPBD Kota Semarang. Subjek penelitian yaitu pegawai BPBD Kota Semarang yang terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Jenis data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kualitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan

Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang

A. Produktivitas

Menurut Sudarmanto (2014:16) yang mengutip dari Dwiyanto, berpendapat bahwa produktivitas dapat dilihat dengan menganalisis tingkat efisiensi, Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan tujuan utama pengukuran efektivitas pelayanan dan kualitas pelayanan publik. Selain itu produktivitas juga melihat capaian target organisasi terhadap realisasi yang ada di lapangan.

Program atau kegiatan yang dilakukan di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang oleh BPBD Kota Semarang belum maksimal dilakukan karena memiliki beberapa kendala yang menghambat program atau kegiatan yang dilakukan diantaranya kekurangan dana untuk mendukung kegiatan yang ada, hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran akibat masa pandemi sehingga refocusing ini lebih memusatkan dan memfokuskan kembali anggaran. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan belum maksimalnya kegiatan yang ada.

Masih terbatasnya EWS, *Early Warning System* sebagai alat pendeteksi

bencana tanah longsor atau alat peringatan dini tanah longsor. Di Kota Semarang sendiri EWS untuk bencana tanah longsor hanya ada 2 yaitu di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan dan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati, sedangkan daerah rawan bencana tanah longsor di Kota Semarang mencakup 37 Kelurahan dari 9 Kecamatan.

Lokasi kantor BPBD Kota Semarang yang tidak berada di tengah Kota, menyebabkan kesulitan sendiri untuk pihak BPBD dalam menanggapi bencana. Hambatan selanjutnya yaitu dalam koordinasi ketika bencana. Dalam penanganan kebencanaan BPBD tidak bekerja sendiri dan tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan pihak-pihak lainnya seperti PMI, basarnas, Disperkim, PU, Dinas Sosial dan lain-lainnya. Koordinasi tersebut menjadi lamban karena harus ada insiden Commander atau harus ada yang mengkoordinasi. Dalam hal ini Sekda menurunkan komandonya kepada Kepala BPBD. Namun masih terkendala karena Kepala BPBD dianggap kurang dalam kepemimpinannya karena masih pegawai baru yaitu baru bekerja selama 2 tahun di BPBD Kota Semarang dan belum begitu mengetahui seluk beluk kebencanaan dan BPBD dibandingkan yang bertahun-tahun sudah bekerja di BPBD serta

mendekati masa pensiun. Sehingga beliau sudah tidak begitu maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kendala selanjutnya yaitu partisipasi, komitmen, dan keaktifan masyarakat yang dinilai masih kurang dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Kemudian kendala selanjutnya yaitu bila lokasi bencana yang berada di jalan yang sempit dan akses masuknya sulit. Hal ini menyebabkan waktu lebih lama dalam penanganan bencana. Apalagi bencana tanah longsor yang biasanya membutuhkan alat-alat berat dan besar. Ini akan lebih banyak membutuhkan waktu dan usaha

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan meskipun masih memiliki hambatan, BPBD Kota Semarang tetap berupaya meningkatkan produktivitas dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Upaya meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan kapasitas interna dan eksternal yaitu adanya pelatihan, diklat, bimbingan teknis, penambahan anggaran serta pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Upaya selanjutnya yaitu dengan meningkatkan keterlibatan ketiga pihak dalam penanggulangan bencana tanah longsor yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan

adanya forum pengurangan resiko bencana dimana semua pihak berdiskusi tentang kebencanaan. Namun, forum ini belum maksimal karena kurangnya masing-masing pihak terkait dengan peran mereka dalam penanggulangan bencana.

B. Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai kemampuan dari organisasi untuk merespon atau menanggapi berbagai macam jenis kebutuhan dari pengguna jasa dalam waktu yang cepat dan tepat sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan.

BPBD Kota Semarang pernah beberapa kali mendapatkan keluhan maupun kritikan dari masyarakat. Biasanya yang menjadi perhatian dari masyarakat terutama persoalan lamanya waktu untuk sampai dilokasi kejadian bencana tanah longsor. BPBD Kota Semarang juga bersikap terbuka jika memang ada kritik dan saran dari masyarakat. Terbukti dari adanya wadah tempat aduan sebagai sarana dan prasarana BPBD Kota Semarang yaitu melalui website resmi BPBD Kota Semarang, media sosial, grup Whatsapp relawan, KSB, KATANA, aplikasi Sapa Mbak ITA yaitu aplikasi penghubung aspirasi warga Kota Semarang kepada Walikota Semarang. serta nomor telepon emergency BPBD Kota Semarang.

Sikap aparaturnya atau pegawai BPBD Kota Semarang dalam merespon keluhan dari masyarakat secara umum mereka akan melihat dan memastikan terlebih dahulu apakah keluhan yang disampaikan memang benar adanya terjadi. Jika memang benar akan segera ditindaklanjuti maksimal waktu penanganan yaitu 5 hari. Jadi dalam 5 hari tersebut sebisa mungkin keluhan yang masuk akan segera direspon, ditanggapi dan ditindaklanjuti dalam kurun waktu 5 hari. Dalam menindaklanjuti laporan atau keluhan tersebut, akan diakan rapat atau koordinasi bidang bersangkutan dengan pemimpin agar penindaklanjutan keluhan berdasarkan diskusi bersama dan keputusan yang diputuskan pemimpin. Bila keluhan yang masuk cukup krusial maka akan diadakan koordinasi dengan Wali Kota, BNPB atau stakeholder lainnya. Tidak adanya hambatan dalam merepon aduan masyarakat. Terlebih di zaman serba internet ini komunikasi lebih mudah dilakukan. Aduan dari masyarakat bisa cepat direspon, terlebih lagi sudah ada wadah pengaduan berbasis online. Namun, masih terhambat dalam keterjangkauan lokasi bencana akibat dari lokasi kantor BPBD yang tidak berada di tengah Kota. Hal ini menyebabkan lamanya waktu untuk sampai dilokasi bencana.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan BPBD atas kegiatan atau program yang dilakukan ke masyarakat. Akuntabilitas yang dilakukan BPBD disetiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana tanah longsor sudah cukup baik. Bentuk pertanggungjawaban BPBD dalam setiap tahapan bencana pada penanggulangan tanah longsor dapat dilihat dari LKPJ (Laporan Keterangan Petanggungjawaban) dan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dimana semua kegiatan atau program yang dilakukan harus dilaporkan ke Walikota. Selain itu bentuk pertanggungjawaban BPBD pada saat pra bencana juga bisa berupa pembuatan peta rawan bencana tanah longsor, pembentukan KSB dan Pembentukan KATANA, serta sosialisasi tentang mitigasi bencana. Kemudian saat tanggap darurat dapat berupa penyediaan logistik bagi korban, penyediaan terpal yang dibutuhkan untuk warga terkena longsor, serta pembuatan dapur umum. Kemudian pada saat pasca bencana yaitu pada tahap pemulihan yaitu secara fisik pembuatan bronjong atau trucuk yang sifatnya sementara serta pemberian bantuan tali asih untuk korban bencana tanah longsor yang meninggal sebesar 10 jt rupiah, serta

korban dengan kerugian harta benda dimana yang dimaksud rumah dengan mengadakan assesmen sebagai hasil rujukan untuk acuan penanganan bantuan lanjutan dari dinas lain terkait. Kemudian untuk yang bersifat permanen yaitu membuat surat untuk merekomendasikan bronjong atau trucuk tadi yang bersifat sementara untuk dibangun yang permanen bila mana dibutuhkan dengan melakukan assesment dan koordinasi dengan stakeholder lainnya.

Bentuk transparansi yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor yaitu dengan adanya website resmi BPBD Kota Semarang yang bisa diakses oleh semua pihak terutama masyarakat yaitu www.bpbd.semarangkota.go.id. Bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan pelaporan program dan kegiatan, kemudian laporan-laporan seperti LKJIP dan terdapat forum TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) serta dokumen lainnya. Ada juga informasi kebencanaan seperti peta rawan bencana tanah longsor di Semarisk yang dapat diakses dari web tersebut serta peta evakuasi bencana tanah longsor, namun untuk peta evakuasi bencana tanah longsor baru ada satu yaitu Peta evakuasi bencana tanah longsor di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan. Tidak ada hambatan dalam mencapai akuntabilitas di

BPBD Kota Semarang. Dengan adanya electronic Government saat ini pemerintahan harus sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua berbasis online yang tentunya memudahkan dalam transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat tahu bagaimana pertanggungjawaban atas kegiatan dan program yang ada.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang.

A. Faktor Pendorong

1. Faktor Personal

faktor personal di BPBD Kota Semarang sudah baik dengan dilihat dari ketrampilan dan komitmen pegawai dengan diadakan secara rutin pelatihan, diklat, dan bimtek untuk selalu meningkatkan kapasitas ketrampilan pegawai dalam penanggulangan bencana tanah longsor serta komitmen pegawai sudah bagus, karena mereka menyadari tugas fungsi masing-masing yang harus dilaksanakan.

2. Faktor Tim

Faktor tim di BPBD Kota Semarang yang diamati dari koordinasi antar pegawai, dukungan yang diberikan antar pegawai, dan

kerja sama yang dilakukan pegawai BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan tanah longsor sudah baik dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kinerja BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan di BPBD Kota Semarang dilihat dari motivasi yang diberikan pemimpin kepada bawahannya sudah baik dalam bidang ataupun dari Kepala BPBD karena adanya apel rutin, *briefing* baik yang rutin maupun yang *incidental*. Kemudian untuk arahan yang diberikan pemimpin kepada bawahannya sudah bagus dalam bidang, namun peran Kepala BPBD masih dinilai kurang karena lebih banyak mendelegasikan dan diambil alih oleh bawahannya.

2. Faktor Sistem

Faktor sistem di BPBD Kota Semarang dilihat dari mekanisme sistem kerja sudah baik karena sudah sesuai dengan tuposinya, namun untuk sarana dan prasarana masih kurang yang menghambat kinerja BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Sarana dan prasarana masih kurang dan terbatas serta beberapa sudah berumur tua

dan perlu diganti. Kemudian penerapan sistem teknologi di BPBD Kota Semarang sudah berkembang dengan adanya aplikasi kebencanaan yang sedang dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.

3. Anggaran

Anggaran dana yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam kinerja Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa BPBD Kota Semarang dalam menjalankan kinerjanya di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana tanah longsor masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Kinerja BPBD Kota Semarang dapat diamati dari aspek produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Aspek produktivitas BPBD Kota Semarang masih belum optimal karena masih adanya kendala dari anggaran, sarana prasarana, lokasi kantor BPBD yang tidak berada ditengah Kota, miskomunikasi dengan masyarakat serta keaktifan peran masyarakat itu sendiri. BPBD Kota Semarang berupaya meningkatkan

produktivitas pelt dengan cara menngkatkan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan bencana tanah longsor, yaitu dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Meningkatkan kapasitas BPBD dalam penanggulangan secara internal yaitu untuk pegawai BPBD dan eksternal untuk masyarakat dan relawan. Peningkatan kapasitas dengan adanya pelatihan, diklat, bimbingan teknis, penambahan anggaran dan pengadaan untuk kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian dari aspek responsivitas setiap tahapan penanggulangan bencana sudah baik, namun belum maksimal karena masih terdapat keluhan dari masyarakat terhadap BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Sikap aparaturnya dalam merespon sudah baik, sudah ada wadah untuk tempat aduan atau keluhan yaitu website resmi BPBD, media sosial, nomor emergency ketika ada bencana, grup Whatsapp relawan, serta aplikasi Sapa Mbak Ita yang bila mana ada keluhan melalui aplikasi Sapa Mbak ITA pasti akan ditangani sesuai arahan yaitu tidak boleh lebih dari 5 hari dalam penanganannya. Responsivitas masih terkendala dalam tahap tanggap bencana masih adanya miskomunikasi saat pemberian logistik, daya tanggap untuk segera sampai lokasi masih terkendala akibat lokasi BPBD

yang tidak berada di tengah Kota. Terkendala waktu penanganan oleh BPBD terbantu karena adanya relawan dan pihak lainnya yang sudah bergerak terlebih dahulu yang merupakan representasi BPBD. Kemudian untuk aspek akuntabilitas yang dilakukan BPBD Kota Semarang dalam setiap tahapan penanggulangan bencana tanah longsor sudah baik. Bentuk pertanggung jawaban dalam akuntabilitas BPBD Kota Semarang yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diupload di website resmi BPBD Kota Semarang yang memudahkan transparansi publik juga melalui media sosial BPBD Kota Semarang. Tidak ada hambatan dalam mencapai akuntabilitas di BPBD Kota Semarang. Dengan adanya electronic Government saat ini pemerintahan harus sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua berbasis online yang tentunya memudahkan dalam transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat tahu bagaimana pertanggungjawaban atas kegiatan dan program yang ada.

Faktor pendorong Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor adalah faktor personal yaitu sudah

baik dalam ketrampilan karena rutin adanya pelatihan, diklat dan bimbingan teknik, serta komitmen petugas sudah baik karena sadara akan tupoksinya; dan faktor tim yaitu koordinasi, dukungan antar pegawai dan kerjasama antar pegawai sudah baik namun keakrapan antar bidang masih kurang, sedangkan faktor penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor yaitu Faktor kepemimpinan yaitu motivasi sudah baik diberikan, dan arahan pemimpin dalam bidang sudah baik namun kurang maksimal dari Kepala BPBD, serta dari peran pemimpin dalam pengambilan keputusan sudah baik, kemudian faktor sistem dari mekanisme sistem kerja sudah baik namun untuk sarana dan prasarana masih kurang lengkap dan berumur tua. Faktor terakhir yaitu faktor anggaran, yang menghambat kinerja BPBD karena anggaran yang ada minim dan kurang serta terbatas.

B. Saran

1. Dalam meningkatkan produktivita BPBD Kota Semarang dalam setiap tahapan dalam penanggulangan bencana tanah longsor yaitu perlu penguatan kembali program-program yang ada, lebih gencar mengedukasi masyarakat mengenai penanggulangan bencana agar

partisipasi dan keaktifan masyarakat lebih meningkat dan mencapai masyarakat yang tangguh bencana.

2. Dalam aspek responsivitas untuk menerapkan atau menetapkan standar waktu repon untuk sampai ke lokasi bencana dalam kurun waktu tertentu agar ada standar pasti.
3. Dalam aspek akuntabilitas untuk lebih update dan ditingkatkan dalam ketepatan waktu mengupload dokumen atau program dan kegiatan.
4. Mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait anggaran, yaitu contohnya anggota dewan DPRD komisi terkait anggaran dana untuk OPD, diikut sertakan disetiap tahapan bencana agar mengetahui keadaan langsung dilapangan seperti apa dan anggaran yang diajukan bisa disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dwiyanto, Agus., dan Dkk. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Keban, Yermias T. (2008). Enam Dimensi strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UNIT

PENERBITAN DAN PERCETAKAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.

Sembiring, Masana. (2012). Budaya dan Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah. Bandung. Fokus Media.

Sudarmanto. (2014). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. (2010). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Dokumen:

LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPBD Kota Semarang tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Website Resmi BPBD Kota Semarang. bpbdsamarangkota.go.id

Berita Online:

Fauziyah, Titis Anis. 2022. 1.798 Kejadian Menimpa Jateng Sepanjang 2022. *Berita Online*. Kompas.com. Diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2022/10/20/192820478/1798-kejadian-menimpa-jateng-sepanjang-2022-paling-banyak-tanah-longsor?page=all>.

Mufarida, Binti. 2021. BNPB Sebut 4 Provinsi ini Rawan Bencana Hidrometeorologi Akibat La Nina. *Berita Online*. SINDOnews.com. Diunduh dari <https://nasional.sindonews.com/read/583482/15/bnpb-sebut-4-provinsi-ini-rawan-bencana-hidrometeorologi-akibat-la-nina-1635491445>